

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI
TINJAUAN KHUSUS HAK PENYEWAAN KARYA
SINEMATOGRAFI DALAM BENTUK VCD**

TESIS

**ALFARED DAMANIK
0806424983**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI
TINJAUAN KHUSUS HAK PENYEWAAN KARYA
SINEMATOGRAFI DALAM BENTUK VCD**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar
Magister Hukum**

**ALFARED DAMANIK
0806424983**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Alfared Damanik

NPM : 0806424983

Tanda Tangan :

Tanggal : 21 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Alfared Damanik
NPM : 0806424983
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi : Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD

Telah berhasil dipertahankan di depan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof.Dr. Agus Sardjono,S.H., M.H. (.....)
Penguji : Dr. Edmon Makarim, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Brian Amy Prastyo, S.H., M.LI. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 21 Juni 2010

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berkat dan rahmat Tuhan tersebut, disertai bimbingan dan bantuan banyak orang.

Pertama, dari hati yang tulus saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing Prof. Agus Sardjono, S.H., M.H., yang dalam kesibukan beliau sebagai dosen selalu meluangkan waktu dan memberikan perhatian untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, dan juga mendorong saya dalam penulisan tesis ini. Semoga Tuhan selalu memberkati, memberi kesehatan, dan kekuatan kepadanya dalam melaksanakan tugas dan pengabdian beliau di hari-hari yang akan datang.

Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yaitu Dr. Edmon Makarim, S.H., LL.M. dan Bapak Brian Amy Prasetyo, S.H.,MLI., yang telah memberikan masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih kepada Bapak AKP. Ferio Sano Ginting Wakasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Bapak Pindan Sidabutar, S.H. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bekasi, Bapak Ahmad Pantoni, S.H. Kasubsi Pra Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bekasi, Bapak Rajaham Sipayung, S.H. Panitera di Pengadilan Negeri Bekasi dan Bapak Marthin Purnomo, S.H. Kasi Kearsipan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah banyak membantu saya untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian dalam penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pimpinan PT. Patco Elektronik Teknologi yang telah memberi kesempatan dan fasilitas, serta selalu mendorong saya untuk menyelesaikan studi program magister hukum terutama kepada Mr. Chacko Cherian (*Deputy President Director*), Bpk. Mayjen TNI (Purn) IGK. Manila (*Director*), Mr. Tadashi Otsuka (*Director*) dan Mr. Pawan Kumar Birla (*Director*), serta semua rekan-rekan sekerja saya di PT.Patco Elektronik Teknologi.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada teman-teman sekelas (Kelas B) Program Pascasarjana Ilmu Hukum, kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan Tahun 2008 (semester Gasal 2008/2009), khususnya kepada Dwi Agus Prianto, Nugroho Kusumowibowo, Karnia Cecilia Sitanggang, Advent H. Nugroho, dan Timbul Hutagaol sebagai teman bertukar pikiran, bertukar informasi, dan saling mendukung selama menjalani studi ini.

Salam hormat dan terima kasih saya haturkan, kepada almarhum kedua orang tua saya, Ayahanda Loden Damanik dan Ibunda Ratna Ukur Br. Sinaga, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mendidik saya. Terutama kepada almarhum Ibunda yang walaupun dalam kondisi sakit beliau selama saya menjalani studi ini tetap memberi dukungan doa, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, kalau sebagai anak, saya belum bisa sepenuhnya memenuhi harapannya.

Ucapan terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak mertua saya, St. Letkol TNI AL (Purn) DS. Sumbayak dan H. Senny Br. Purba yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat maupun nasihat agar saya dapat menyelesaikan studi saya.

Akhirnya, penghargaan dan tali kasih yang tinggi saya sampaikan kepada istri saya, Jeanni Triana Saragih, S.E., dan ketiga puteri-puteriku Alicia Putri Damanik, Alyssa Dwinovany Damanik, dan Alexa Cindy Marion Damanik. Istriku dan anak-anakku lah yang telah membangkitkan semangat untuk menyelesaikan pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta, 1 Juli 2010

Alfred Damanik

KATA PENGANTAR

Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia pada era 1998 hingga sekarang tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan WTO (*World Trade Organization*). Dengan meratifikasi WTO pada tahun 1994, Indonesia telah memberikan komitmen kepada dunia internasional untuk menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang ekonomi dan perdagangan dengan kesepakatan-kesepakatan WTO tersebut. Salah satu bidang hukum yang harus disesuaikan adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam kerangka WTO, bidang ini telah disepakati dalam *TRIPs Agreement*. TRIPs merupakan standard internasional yang harus dipakai negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia berkenaan dengan HKI. Persetujuan TRIPs mengatur tentang norma-norma dan standar, dan dalam beberapa hal mendasarkan diri pada prinsip ” *full compliance*” terhadap konvensi-konvensi HKI yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep yang menyangkut perlindungan HKI bukanlah ide asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena konsep tentang HKI yang bersifat eksklusif dan tidak berwujud (*immateril*) sangat berbeda dengan konsep bangsa Indonesia yang pada umumnya di bawah payung pandangan komunal memahami benda sebagai barang yang berwujud (*materil*).

Sebagai bagian dari kerangka HKI, di dalam ketentuan perundang-undangan nasional kita ketentuan hak penyewaan (*rental right*) atas karya sinematografi mulai diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selama proses penyempurnaan undang-undang hak cipta di Indonesia, klasifikasi delik atas pelanggaran hak cipta telah pula dirubah dari semula delik aduan menjadi delik biasa, yang artinya pihak penegak hukum dapat bertindak proaktif dalam menegakkan hukum tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat. Demikian juga sanksi pidana atas

pelanggaran hukum hak cipta telah diperberat. Namun di tataran praktis ditemui maraknya kasus pelanggaran ketentuan hak cipta bahkan Indonesia dijuluki sebagai sarang pembajakan hak cipta.

Hak penyewaan atas karya sinematografi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam penegakannya juga menghadapi kendala-kendala dan belum dapat berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Tesis ini secara khusus mengangkat penelitian atas perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya sinematografi dengan tinjauan khusus terhadap hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD, dalam fokus penelitian hukum yang normatis empiris (terapan), yaitu mengkaji perlindungan hukum dalam hal ini ketentuan hukum positif (undang-undang hak cipta) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melalui penelitian sosiolegal, hukum tidak dianggap sebagai peraturan atau kaedah-kaedah saja namun juga dikaji bagaimana bekerjanya hukum itu ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.

Jakarta, 1 Juli 2010

Alfred Damanik

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfared Damanik
NPM : 0806424983
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-eksklusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi: Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemegang Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 21 Juni 2010

Yang Menyatakan,

Alfared Damanik

ABSTRAK

Nama : Alfared Damanik
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi : Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD

Tesis ini membahas perlindungan hukum hak cipta atas karya sinematografi dengan tinjauan khusus hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD. Dengan pendekatan sosiolegal, dilihat bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat serta berinteraksi dengan lingkungan di mana hukum itu diberlakukan. Memakai analisa deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menggambarkan realita atas permasalahan yang ada di lapangan untuk menunjang hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum hak cipta atas hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD belum dapat berjalan, disebabkan: perbedaan konsep kepemilikan pelaku usaha penyewaan dengan konsep rezim hak cipta, kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum terhadap hak penyewaan, penegak hukum belum serius, dan belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan hak penyewaan. Juga bahwa pemegang hak cipta lebih fokus kepada pemberantasan pembajakan VCD.

Kata kunci: Hak penyewaan, karya sinematografi, VCD

ABSTRACT

Name : Alfared Damanik
Study Program : Postgraduate Program in Economic Law
Judul Tesis : The Legal Protection of Copyright on Cinematography Work: Special Review on Rental Right of Cinematography Work in the form of VCD

This thesis to study about legal protection of copy right on cinematografi work with special review on rental right of cinematography in the form of VCD. Using the socio-legal approach, to see how the law works among society and how it interacts on the environment where it prevail. Qualitative descriptive analysis is used to describe and explain the reality of legal problems that has existed to support the result of field research.

The research result show that the copyright law enforcement on rental right of cinematography in the form of VCD hasn't been being realized yet, caused by: difference of the ownership concept between rental entrepreneurs and the copyright concept, the people's and the law enforcement apparatus's knowledge about rental right are still weak, the apparatus have not worked seriously to enforce the copyright provision, and the rental right regulation has not been complemented by implementation regulations. Also found that the copyright holders are more focus to eliminate the copyright pirating of VCD.

Key word: Rental right, cinematography work, VCD

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Kata pengantar.....	vi
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis.....	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Spesifikasi Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan.....	10
1.5.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.4 Teknik Penentuan Responden.....	13
1.5.5 Metode Analisis Data.....	14
1.5.6 Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	14
1.5.7 Lokasi penelitian.....	14
1.5.8 Defenisi Operasional Variabel.....	15
1.6 Sistematika Penelitian.....	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Hak Cipta Merupakan Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	19
2.1.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	19
2.1.2 Pengertian HKI.....	22
2.1.3 HKI Sebagai Hak Kebendaan.....	23
2.2 Perlindungan Hak Cipta di Indonesia.....	26
2.2.1 Ketentuan Hak Cipta Indonesia Dalam Sejarah.....	26
2.2.2 Pengertian Hak Cipta.....	32
2.2.3 Prinsip-prinsip Hak Cipta.....	33
2.2.4 Ruang Lingkup Hak Cipta.....	33
2.2.5 Pembatasan Hak Cipta.....	33
2.2.6 Hak Cipta Dan Hak Terkait (<i>Neighbouring Right</i>).....	36
2.2.7 Hak-Hak Pencipta.....	38
2.2.8 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	39
2.3 Hak Cipta Karya Sinematografi Sebagai Hak Yang Dilindungi Undang-Undang.....	40
2.3.1 Pengertian Karya Sinematografi.....	40
2.3.2 Karya Sinematografi Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi.....	42

BAB 3	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
3.1.	Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD.	47
3.1.1	Pandangan Para Pelaku Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD di Kota Bekasi Terhadap Pengaturan Hak Penyewaan Dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	47
a.	Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	48
b.	Sikap Pelaku Usaha Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD Terhadap UU. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	54
3.1.2	Peranan Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam Bentuk VCD.....	58
a.	Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).....	58
b.	Peranan Kejaksaan Negeri Bekasi (Kejari Bekasi).....	67
c.	Peranan Hakim di Pengadilan Negeri Bekasi.....	70
3.1.3	Perlunya Peraturan Pelaksana Tentang Hak Penyewaan dalam Undang Undang Hak Cipta.....	77
3.2	Tindakan-Tindakan Hukum Yang Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta Dalam Rangka Memfungsikan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	79
3.2.1	Profil Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI).....	79
3.2.2	Peran dan Eksistensi Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia.....	81
3.2.3	Perkembangan Rekaman Video.....	82
3.2.4	Tindakan Hukum Yang Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta.....	82
BAB 4	PENUTUP	88
4.1	Kesimpulan.....	88
4.2	Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA	95
	DAFTAR LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Perbandingan Hak Cipta dan Hak Terkait.....	37
Tabel 3.1	
Tingkat Pendidikan Pelaku Usaha Penyewaan VCD.....	49
Tabel 3.2	
Lama Pelaku Usaha Melakukan Penyewaan	49
Tabel 3.3	
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	50
Tabel 3.4	
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD terhadap Perlindungan Karya Cipta VCD.....	50
Tabel 3.5	
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Hak Penyewaan Dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	51
Tabel 3.6	
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Bahwa Hak Cipta Merupakan Hak Milik Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang Bersifat Penuh/Mutlak.....	52
Tabel 3.7	
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Bahwa Hak Cipta Bersifat Eksklusif/Khusus.....	53
Tabel 3.8	
Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	55
Tabel 3.9	
Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Ketentuan Hak Penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	55
Tabel 3.10	
Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Karya Cipta VCD yang Bersifat Penuh/Mutlak.....	57
Tabel 3.11	
Sumber Daya Manusia Sat Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi Tahun 2010.....	59

Tabel 3.12
Pengalaman Kerja Anggota Sat Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi.....60

Tabel 3.13
Tingkat Pendidikan Anggota Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi.....61

Tabel 3.14
Tingkat Pengetahuan Anggota Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....61

Tabel 3.15
Tingkat Pengetahuan Anggota Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi Terhadap Ketentuan Hak Penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....65